



**KONTRAK PENGADAAN HULU MIGAS DIKAITKAN  
DENGAN PERATURAN SINERGI BUMN  
DAN PERSAINGAN USAHA**

**TESIS**

**Romi Prayudi**

**1910622007**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**2021**



**KONTRAK PENGADAAN HULU MIGAS DIKAITKAN  
DENGAN PERATURAN SINERGI BUMN  
DAN PERSAINGAN USAHA**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan  
Gelar Magister Hukum (MH)

**Romi Prayudi**

**1910622007**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**2021**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Romi Prayudi  
NRP : 1910622007  
Tanggal : 2 Agustus 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



ROMI PRAYUDI

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai Civitas Akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Romi Prayudi  
NRP : 1910622007  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KONTRAK PENGADAAN HULU MIGAS DIKAITKAN DENGAN  
PERATURAN SINERGI BUMN DAN PERSAINGAN USAHA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Romi Prayudi

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Romi Prayudi  
NRP : 1910622007  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : **KONTRAK PENGADAAN HULU MIGAS  
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN SINERGI  
BUMN DAN PERSAINGAN USAHA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian pernyataan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Atik Winanti, SH, MH

Ketua Penguji



Dr. Drs. Imam Haryanto, SH, MH

Penguji II/ Pembimbing



Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M

Kaprodi



Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 27 Juli 2021

## ABSTRAK

Ketentuan Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengadaan barang dan jasa memberikan keistimewaan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan dan/atau pihak terafiliasi sebagai penyedia barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN agar mampu mempersingkat waktu dan meningkatkan kesempatan bisnis perusahaan plat merah (Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN). Persaingan Usaha di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dengan prinsip utama sistem pengadaan barang/jasa ialah transparansi, non-diskriminasi, dan efisiensi. Prinsip non-diskriminasi yang dimaksudkan ialah adanya inklusifitas dalam berusaha bagi semua pelaku usaha. Dalam industri hulu minyak dan gas (migas) di Indonesia, kontrak kerja antara pelaku usaha eksplorasi dan eksploitasi migas dengan Pemerintah Indonesia dinamakan *Production Sharing Contract* atau PSC. Dalam skema PSC *cost recovery*, Kontraktor dalam menjalankan operasinya harus tunduk aturan yang dikeluarkan oleh SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah. Khusus pada proses pengadaan barang/jasa, SKK Migas mengeluarkan Pedoman Tata Kerja nomor 007 tentang Pengelolaan Rantai Suplai. Bagi Kontraktor yang proses pengadaannya tidak sesuai PTK 007, maka ada bagian biaya yang tidak dapat ditanggung oleh pemerintah (*non-cost recovery*). Dalam PTK 007, disebutkan bahwa Sinergi yang bisa dilakukan hanya dalam perimeter Sektor Hulu Migas saja. Penulis melihat adanya masalah hukum dalam pelaksanaan Sinergi BUMN (dalam hal ini PT Pertamina sebagai satu-satunya BUMN hulu migas) dengan prinsip hukum persaingan usaha yang tidak sehat karena prinsip eksklusifitasnya, dan masalah hukum Sinergi Inkorporasi Pertamina dengan proses pengadaan barang/jasa dengan PTK 007. Kesimpulan utama yang didapat ialah secara pendekatan *per se illegal*, Sinergi Inkorporasi Pertamina termasuk hal yang dilarang dalam ketentuan UU Anti Monopoli. Namun jika dilihat dari pendekatan *rule of reason*, Sinergi Inkorporasi ini tidak sampai membuat terciptanya posisi dominan atau mengarah pada monopoli dari suatu perjanjian intra Pertamina. Saran yang bisa disampaikan dari hasil penulisan ini ialah ketentuan PTK 007 SKK Migas harus bisa mengadaptasi semangat yang ada pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN mengenai Sinergi BUMN yang proses pengadaan di industri hulu migas terbuka untuk seluruh bisnis yang ada di BUMN.

Kata kunci: Sinergi BUMN, Pedoman Tata Kerja 007, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## ABSTRACT

*The provisions for the Synergy of Indonesia State-Owned Enterprises (SOE or BUMN) in the procurement of goods and services provide the privilege of direct appointment to subsidiaries and/or affiliated parties as providers of goods and services within the BUMN environment in order to be able to shorten the time and increase business opportunities (Ministerial Regulation Number PER-08/MBU/12/2019 concerning Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for BUMN). Business Competition in Indonesia is specifically regulated in Law No. 5 of 1999 with the main principles of the procurement system being transparent, non-discrimination, and efficient. The non-discrimination principle meant is inclusiveness in doing business for all business actors. In the upstream oil and gas industry in Indonesia, the working contract between oil and gas exploration and exploitation business actors and the Government of Indonesia is called a Production Sharing Contract or PSC. In the PSC cost recovery scheme, the Contractor in carrying out his operations must comply with the rules issued by SKK Migas as a government representative. Specific in the process of procuring goods/services, SKK Migas issued Working Procedure Guidelines number 007 (Pedoman Tata Kerja/PTK 007) regarding Supply Chain Management. For contractors whose procurement process does not comply with PTK 007, then there is a part of costs that cannot be borne by the government (or non-cost recovery). In PTK 007, it is stated that the synergy BUMN that can be carried out is only within the perimeter of the Upstream Oil and Gas Sector. The author sees a legal problem in the implementation of SOE Synergy (in this case PT Pertamina as the only SOE upstream oil and gas) with the legal principle of unfair business competition due to its exclusivity, and the legal problem of Pertamina Incorporation Synergy with the procurement process of goods/services with PTK 007. The main conclusion is in per se illegal approach, Pertamina Incorporation Synergy is prohibited in the provisions of Antitrust Law. However, if viewed from the rule of reason approach, this Incorporation Synergy does not create a dominant position or lead to a monopoly. Suggestion that can be conveyed are the PTK 007 SKK Migas must be able to adapt the spirit in the provisions of the Minister of BUMN Regulation regarding its Synergy in which the procurement process in Pertamina is open to all businesses in BUMN.*

*Keywords: Synergy of Indonesia State-Owned Enterprises, PTK 007 SKK Migas, Unfair Competition.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan tesis yang berjudul “Kontrak Pengadaan Hulu Migas Dikaitkan Dengan Peraturan Sinergi BUMN dan Persaingan Usaha” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan dan Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister atas segala arahan yang menyejukkan.
2. Bapak Dr. Drs, Imam Haryanto, SH, MH selaku Dosen Pembimbing atas segala review dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
3. Ibu Dr. Atik Winanti, SH, MH dan Bapak Dr. Arrisman, SH, MH selaku Penguji ujian tesis atas review dan arahnya.
4. Keluarga inti saya yang mendukung selama studi dimana sering kali mengurangi waktu kebersamaan bagi mereka.
5. Teman-teman kuliah yang senantiasa saling membantu dan juga atas keceriaannya selama kuliah bersama.
6. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, 2 Agustus 2021

Penulis

Romi Prayudi



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>		ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b>		iii
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>		iv
<b>PENGESAHAN</b>		v
<b>ABSTRAK</b>		vi
<b>ABSTRACT</b>		vii
<b>KATA PENGANTAR</b>		viii
<b>DAFTAR ISI</b>		ix
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Perumusan Masalah	7
1.3	Tujuan Penelitian	8
1.4	Manfaat Penelitian	8
1.5	Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	8
1.5.1	Kerangka Teoritis	9
1.5.1.A	Teori Kepastian Hukum	10
1.5.1.B	Teori Hukum Persaingan Usaha	11
1.5.2	Kerangka Konseptual	17
1.6	Sistematika Penulisan	19
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	21
2.1	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	21
2.2	Sinergi BUMN dan Sinergi Inkorporasi BUMN	24
2.3	Pedoman Tata Kerja 007	29
2.4	Kontrak Kerja Sama Kegiatan Hulu Migas Indonesia	31
2.5	Persaingan Usaha di Indonesia	36
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	40
3.1	Jenis Penelitian	40
3.2	Jenis Pendekatan	40
3.3	Sumber Bahan Hukum	41
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	43

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	44
4.1	Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 dan kaitannya dengan Perpres 16/2018 dan Permen BUMN 8/2019.	44
4.2	Sinergi Inkorporasi BUMN dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	49
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		64
<b>RIWAYAT HIDUP</b>		68